

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*.
- Darmawan, I. (2015). Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Lingkungan TemanSebaya Terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi PadaSiswa. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*.
- Hadjimonalis, Anthanasios., Keith Dickson (2000), Innovation Strategies of SMEs in Cyprus, Small Developing Country, *International Small Business journal*.
- Irawan Nata. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Konstantinidis, Andreas, Demetrios Zeinalipour-Yazti, Panayiotis Andreou, George Samaras, and Panos K. Chrysanthis. "Intelligent Search in Social Communities of Smartphone Users." *Distributed and Parallel Databases* 31, no. 2 (June 1, 2013).
- Kresnawati dan Siti Hanila. (2019). Strategi Inovasi Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Seluma Dengan Metode Criterium Plus – AHP. *Fakultas Ekonomi, Universitas Dehasen. Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen ISSN Volume 14. No.2, Oktober 2019*.
- Kurniawan, Ade Eka. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Nurlan, Darise. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks Jakarta.
- Mathie, Alison, and Gord Cunningham. (200). "From Client To Citizens: Asset-Based Community Development as a Strategy for Community Driven Development." *Coady International Institute*. Antigonish, Canada.
- Mukhlas, A. P. S. (2008). AnalisisPengembangan Fasilitas KawasanWisata Pantai Trikora Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau(Tugas Akhir). *Universitas Riau.Pekanbaru*.

- Munasaroh Siti Ani. 2019. Pemeberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Margesari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Universitas Negeri Walisongo. Semarang.
- Ridlwan, Z. (2015) 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', FIAT JUSTISIA. doi: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.396.
- Rozaki, Abdur. (2015). Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press dan Ford Foundation.
- Rozaki, Abdur dan Siti Rohaya. (2019). Memberdayakan Desa Melalui Pariwisata Berbasis BUMDES: Studi Interkoneksi BUMDES Melalui Integrated Information System di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Sa' ud Udin Syaefudin. (2014). Inovasi Pendidikan. Cetakan ke vii. Alfabeta. Bandung.
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad.
- Setyawan Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Inteligencia Media.
- Sumodinngat Gunawan, Ari wulandari. (2016). Membangun Indonesia dari Desa. Media Presindo. Yogyakarta.
- Supratiwi. (2013). Peranan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Wibisono, Arif Fajar dan Panuntun. (2020). Optimalisasi Fungsi BUMDES Melalui Inovasi dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. JAMALI - Jurnal Abdimas Madani dan Lestari Vol. 02, Issue. 01, Maret 2020.
- Widjaja Haw. (2014). Otonomi Desa Merupakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Interpretama Mandiri. Jakarta.

#### **Sumber-Sumber Lainnya :**

- Keputusan Menteri Desa No 83 tahun 2017 Tentang pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (diakses melalui [binapemdes.kemendagri.go.id](http://binapemdes.kemendagri.go.id), diakses pada tanggal 19 Januari 2021)

<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/199604/jokowi-dana-desa-fokus-pembangunan-sdm>

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (diakses melalui [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), pada tanggal 3 Januari 2021).

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diakses melalui [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), pada tanggal 3 Januari).